

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG

Oleh:

Friska Langelo¹
David Paul Elia Saerang²
Stanly Winyson Alexander³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹friskalangelo@yahoo.co.id
²d_saerang@lycos.com
³Stanly_w.alexander@yahoo.com

ABSTRAK

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

Kata kunci: akuntansi, basis akrual, SAP

ABSTRACT

The issuance of Government Regulation (PP) No.71 in 2010 on Governmental Accounting Standard and Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No.64 in 2013 about application of accrual-based government accounting standards in local government, in article 10 paragraph (2) which states that the application of accrual-based government accounting standards in local government slowest start of the fiscal year 2015, every the regional government financial report required to be properly according to applicable regulations. This study aims to examine reporting financial statement and determine the readiness of the Bitung City government in presenting the financial statements based on accrual-based government accounting standards. This research is using descriptive analysis method. Data are obtained through field study. The results showed that the Bitung City Government has not apply the PP. 2010 No.71 yet but it has based on PP. 2005 No.24 that is used cash towards accrual, be found obstacle in readiness like the less quantity of human resource as implemnter at every SKPD and readiness tools is not yet to put to a test. Necessary to improve the quality and quantity of human resources educational background appropriate accounting and held socialization, technical assistance so as to produce financial statements that relevant and transparent.

Keywords: accounting, accrual basis, the governmental accounting standards

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, mendorong kita mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas.

Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya SAP.

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. Dalam hal ini Pemkot Bitung sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Sejalan dengan akan diterapkannya SAP Berbasis Akrual baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan direvisinya PP No.24 Tahun 2005 menjadi PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, membawa beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah, serta didukung dengan ditetapkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, maka peneliti akan mencoba menganalisis penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi

Kieso (2008:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Halim dan Kusufi (2012:36) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Darise (2009:77) menyatakan bahwa sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Laporan Keuangan Daerah

Tanjung (2012:12) menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Basis Akrua

Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrua dimaksud tercantum dalam Lampiran I PP No.71 Tahun 2010.

Penelitian Terdahulu

1. Kema (2013) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan daerah pemerintah Kota Manado sesuai dengan SAP. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Manado pada tahun 2011 dalam penyajian laporan keuangan daerah belum mengacu pada SAP, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah Kota Manado telah berpedoman pada SAP.
2. Faradillah (2013) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan pemerintah kota Makasar dalam menerapkan SAP Berbasis Akrua. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akrua.
3. Kusuma (2013) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus Pada Kabupaten Jember). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan Pemda Kabupaten Jember, mengetahui kendala dalam implementasi PP No.71 Tahun 2010 dan untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, untuk menjelaskan bagaimana kesiapan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Pemerintah Kota Bitung di Jalan DR.Sam Ratulangi No.45 Kota Bitung dan waktu penelitian dimulai pada bulan september sampai dengan desember tahun 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Pemkot Bitung khususnya untuk setiap SKPD Pemerintah Kota Bitung.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu studi kepustakaan, pengamatan/observasi dan wawancara langsung.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, pada langkah ini dimulai dengan mengumpulkan data dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKBMD untuk dilihat latar belakang pendidikan, kebijakan-kebijakan tertulis sehubungan dengan penerapan SAP Berbasis Akruar serta laporan keuangan yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akruar, kemudian dianalisis kesiapan penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kota Bitung merupakan salah satu pemerintah kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah daratan 304 km². Sebagian besar wilayah daratan merupakan daerah berbukit, berbukit dan gunung. Secara Geografis Kota Bitung terletak pada posisi diantara 1°23'23" - 1°35'39" LU dan 125°1'43" - 125°18'13" BT. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Likupang dan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara), Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara). Wilayah daratan mempunyai luas 304 km², secara administratif terbagi dalam lima wilayah kecamatan serta enam puluh kelurahan. Lima kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Bitung Utara (136,40 km²) meliputi 12 kelurahan, Kecamatan Bitung Tengah (24 km²) meliputi 10 kelurahan, Kecamatan Bitung Barat (33,62 km²) meliputi 10 kelurahan, Kecamatan Bitung Timur (59,08 km²) terdiri dari 13 kelurahan dan Kecamatan Bitung Selatan yang terdapat di Pulau Lembeh (50,90 km²) meliputi 15 kelurahan.

Hasil Penelitian

Pelaporan Keuangan di Pemerintah Kota Bitung

Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akruar. Dimana PP No.24 Tahun 2005 Lampiran II masih memperbolehkan penggunaan CTA. Penggunaan basis akuntansi di Pemkot Bitung juga masih menggunakan CTA, CTA sendiri disebut juga dengan basis modifikasian. Pemerintah Kota Bitung menyajikan 4 (empat) Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pada dasarnya basis akuntansi hanya dikenal dua, yaitu Basis Kas dan Basis Akruar. Secara teori sendiri tidak ada teori untuk CTA. Disebut CTA dan/atau Kas Menuju Akruar karena untuk realisasi anggaran masih menggunakan basis kas sedangkan untuk neraca menggunakan basis akruar.

Pembahasan

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP. SAP tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akruar untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Penerapan PP

No.24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, PP No.24 Tahun 2005 perlu diganti. Lingkup pengaturan PP ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dan/atau Cash Toward Acrual (CTA). SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Dalam PP No.71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu:

1. Jurnal Finansial untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran
2. Jurnal Anggaran untuk mencatat seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional.

Terlihat dari hasil penelitian dan data, Pemkot Bitung sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Adanya pengakuan dari BPK merupakan citra yang baik untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan publik atas kualitas, kredibilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah serta mutu kinerja aparatur pemerintah. Dilihat dari sisi pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Kota Bitung sudah merupakan panutan untuk daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara. Adanya opini audit dari BPK berupa WDP (sejak tahun 2006 sampai dengan 2010) dan WTP (dari tahun 2011 sampai dengan 2013) menjadikan Kota Bitung memiliki nilai lebih di mata publik atas kualitas kinerja aparatur pemerintahnya, transparansi dan kredibilitas laporan keuangannya.

Dalam penilaian kesiapan Pemkot Bitung dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual penuh berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, adanya pendapat BPK pada poin ketujuh tentang "Pemkot Bitung Belum Sepenuhnya Siap Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kata Belum sepenuhnya siap dikarenakan kesiapan SDM, infrastruktur dan penganggaran yang masih sementara dilakukan yang belum rampung semuanya. Kata belum sepenuhnya siap bukan berarti tidak siap sama sekali, karena jika dilihat dari sisi pembuatan laporan keuangan, Pemkot Bitung sudah diakui untuk membuat laporan keuangannya sendiri dengan baik. Apalagi dalam hal ini, SAP Berbasis Akrual merupakan "hal yang baru" yang masih perlu dipelajari dan di tindak lanjuti sehingga bisa dilaksanakan secara baik, benar dan tepat.

Kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan PP No.71 Tahun 2010

Kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Kualitas SDM pengelola di setiap SKPD
2. Kesiapan perangkat pendukung (*tools*) dalam hal ini "SIMDA yang belum teruji untuk Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual" kaena masih dikembangkan, SIMDA telah teruji dan baik untuk SAP non akrual.
3. Masih kurangnya sosialisasi, bintek dan pelatihan personil akuntansi di SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah).
4. Merubah *mindset* pejabat penatausahaan keuangan di SKPD yang masih sangat bergantung pada BPKBMD (Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah).

Rencana Strategis Pemerintah Kota Bitung Dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua

Dalam menerapkan PP No.71 tahun 2010 dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang mengharuskan penerapan SAP Berbasis Akrua pada pemerintah daerah paling lambat mulai Tahun 2015, Pemerintah Kota Bitung menyadari sepenuhnya bahwa penerapan SAP dalam menyajikan laporan keuangan di setiap kementerian/lembaga maupun daerah sangat wajib segera dilaksanakan. Adanya audit yang akan dilakukan oleh BPK berperan terhadap opini yang akan diberikan BPK atas laporan keuangan. Dasar BPK melakukan audit adalah SAP, sehingga penyusunan laporan keuangan harus berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas. Kota Bitung yang dalam hal ini belum menerapkan SAP berbasis akrua dan/atau *full acrua*, tetapi dari prinsip dasar standar tersebut ada beberapa keuntungan, diantaranya Kota Bitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 mendapatkan opini audit WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 ini mndapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dilihat dari sisi Kota Bitung dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah, memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas seluruh penggunaan seluruh sumber daya baik aktiva/ kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan dengan baik.

Pemkot Bitung khususnya Walikota Bitung telah mengeluarkan keputusan, yaitu Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/152/2014 tentang Penetapan Tahapan Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bitung antara lain telah menyusun peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi akrua, mengalokasikan tambahan anggaran untuk pelatihan akrua bagi pengelola keuangan SKPD, menyiapkan SDM yang kompeten melalui pelatihan dan sosialisasi, perbaikan pengelolaan barang milik daerah melalui inventarisasi, penatausahaan dan pengamanan, penetapan umur teknis dan menghitung penyusutan aset tetap serta penggunaan aplikasi SIMDA keuangan yang sudah mengakomodir sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua, diharapkan dapat menunjang kesiapan pemerintah Kota Bitung untuk lebih mapan dan mantap dalam menerapkan SAP Berbasis Akrua dalam menyajikan laporan keuangan. Dengan hal ini, Pemkot Bitung menunjukkan komitmen dan apresiasi nyata dalam melaksanakan dan/atau menerapkan peraturan pemerintah untuk menerapkan SAP Berbasis Akrua yang diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Acrua*) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrua.
2. Kendala dalam menerapkan PP No.71 Tahun 2010, tentang SAP pada Pemkot Bitung antara lain, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD, kesiapan perangkat pendukung (*tools*) dalam hal ini SIMDA yang belum teruji untuk penerapan SAP Berbasis Akrua, masih kurangnya Bintel atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi, serta merubah *mindset* pejabat penatausahaan keuangan di SKPD yang masih sangat bergantung pada BPKBMD.
3. Adanya Keputusan Walikota Bitung No.188.45/HKM/SK/152/2014 tentang Penetapan Tahapan Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemkot Bitung yang mendukung dan menjadi rencana strategis, standar awal dan persiapan internal yang wajib dilaksanakan dalam penerapan SAP Berbasis Akrua nantinya.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Secepatnya merekrut dan/atau menambah SDM yang kompeten berlatar belakang pendidikan akuntansi, serta diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan Pemkot Bitung akan SAP berbasis akrua
2. Merubah *mindset* pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang masih sangat bergantung pada BPKBMD dengan cara sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah (untuk saat ini yang lebih baik dan tepat dilakukan adalah "*Learning by doing*")

3. Secara berkala dilakukan sosialisasi, *training of trainers (TOT)*, bimbingan teknik atau pelatihan dan simulasi pembuatan laporan keuangan yang berdasarkan SAP berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II. PT Indeks, Jakarta.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010)*. Universitas Hasanuddin. Makasar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5646/Skripsi%20%28Full%29.pdf?sequence=1>. Diakses 23 September 2014. Hal.1-119.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Kema, Ihwan, 2013. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN: 2303-1174 Vol.1 No.3 September 2013. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses 25 September 2014. Hal.771-781.
- Kieso E. Donald, Jerry. J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermedit edisi kedua belas jilid 1*. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi Ketiga. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Kusuma, Ririz, 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/2182/Ririz%20Sstiwati%20Kusuma%20-%20090810301007.pdf?sequence=1>. Diakses 25 September 2014. Hal.1-127.
- PP. RI No.24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- PP. RI No.71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Permendagri No.64 Tahun 2013. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Tanjung, Abdul Hafis. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit: Alfabeta, Bandung.